

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 1. IKHTISAR KINERJA

Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan SK LAN No. 239/VI/8/9/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011.

Pemerintah Kota Cimahi mempunyai Visi "**Dengan Iman , Taqwa, Optimis dan Cerdas, Jadikan Cimahi Kota Maju, Agamis, Nyaman, Tertib, Aman dan Produktif**". Untuk mencapai Visi tersebut, Kota Cimahi telah menetapkan Misi yang harus diembannya yaitu :

- a. Meningkatkan Sarana Perekonomian dan Lapangan Kerja;
- b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Meningkatkan Penataan dan Penegakan Hukum;
- d. Meningkatkan Infrastruktur Kota;
- e. Mengendalikan Pembangunan agar Berwawasan Lingkungan;
- f. Meningkatkan Kemitraan dengan Dunia Usaha.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun 2011 mencapai melalui beberapa sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja. Berikut uraian capaian kinerja berdasarkan Misi Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun 2011.

- **Misi Satu** : **Meningkatkan Sarana Perekonomian dan Lapangan Kerja**, dicapai melalui 13 (tiga belas) sasaran yang didukung dengan 92 (sembilan puluh dua) indikator kinerja, rata-rata capaian indikator kinerja untuk Misi 1 sebesar 98,21%.
- **Misi Dua** : **Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan**, dicapai melalui 20 (dua puluh) sasaran yang didukung dengan 282 (dua ratus delapan puluh dua) indikator kinerja, rata-rata capaian indikator kinerja Misi 2 sebesar 103,69%.
- **Misi Tiga** : **Meningkatkan penataan dan penegakan hukum**, dicapai melalui 6 (enam) sasaran yang didukung dengan 207 (dua ratus tujuh) indikator kinerja, rata-rata capaian indikator kinerja Misi 3 sebesar 98,71%.

- **Misi Empat** : **Meningkatkan Infrastruktur Kota**, dicapai melalui 11 (sebelas) sasaran yang didukung dengan 104 (seratus empat) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian 99,75%.
- **Misi Lima** : **Mengendalikan Pembangunan Agar Berwawasan Lingkungan**, dicapai melalui 3 (tiga) sasaran yang didukung dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja dimana rata-rata capaian Misi 5 adalah 109,31%.
- **Misi Enam** : **Meningkatkan Kemitraan Dengan Dunia Usaha**, dicapai melalui 1 (satu) sasaran yang didukung dengan 16 (enam belas) indikator kinerja dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 97,5%.

Persentase pencapaian indikator kinerja di atas merupakan gambaran pencapaian kinerja pembangunan di Kota Cimahi. Selain daripada itu Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan beberapa penghargaan yang diterima pada tahun 2011, yaitu :

- e-Gov Awards 2011 untuk Smart City Award Terbaik ke-2 kategori Smart Economy, Smart City Award Terbaik ke-2 kategori Smart Governance dan e-Gov Awards 2011 kategori Kabupaten/Kota,
- Anugerah Apresiasi Inovasi Indonesia 2011 atas Innovation Leadership Award untuk Ir. HM. Itoc Tochija, MM, Innovating Region Award untuk Kota Cimahi, Technopreneurship Award sub-kategori PI UMKM untuk CCA, Technopreneurship Award sub-kategori UKM Pemula untuk PT. FIN KOMODO TEKNOLOGI dan Green Innovation Award untuk Kompor DARULANG,
- ICT PURA 2011 sebagai Kabupaten/Kota Digital Berpredikat UTAMA yang telah siap dan memiliki kemampuan daya saing di era ekonomi digital,
- Satyalancana Kebaktian Sosial Penghargaan sebagai Ketua K3S Kota Cimahi (Hj. Atty Suharti Tochija),
- Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP Awards) 2010 dari Kementerian Dalam Negeri,
- Peringkat I Lomba Cipta Makanan 3B tingkat Nasional Kategori Pengembangan Kreativitas Resep Pangan,
- Bakti Koperasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM,
- Swasti Saba Wiwerda Penghargaan Kota Sehat Untuk Ke-2 kali secara berturut-turut,
- Satyalancana Wirakarya untuk Penghargaan Kepada Ketua TP PKK Kota Cimahi,
- Pakarti Utama I dari TP PKK Tingkat Nasional untuk Penghargaan Lomba Bersih Sehat 2010,
- Wahana Tata Nugraha Dalam Pengelolaan Ketertiban Lalulintas & Angkutan Kota,
- 10 Walikota Terbaik dari Majalah Swa Sembada,

- 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan daerah tahun 2009,
- Adiputera Puritama untuk Kota Terbaik ke-II Kategori Kota Menengah/ Kecil Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman,
- Penghargaan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi Jawa Barat,
- Anugerah Media Humas kategori Kalender Resmi Pemerintahan,
- Rekor MURI untuk kategori peserta terbanyak dalam pelatihan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) yang berjumlah 9.335 orang.

Penghargaan tersebut merupakan cerminan atas kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi yang mana mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak swasta.

Hal ini akan menjadi pemacu dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan serta memperbaiki kinerja yang telah dicapai. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya kerjasama yang konstruktif dan saling menunjang diantara pihak yang terkait, sehingga dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Cimahi.

Sebagai penutup, semoga LAKIP tahun 2011 memberikan informasi capaian kinerja yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi pertanggungjawaban, media pertanggungjawaban kepada publik dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita selalu.

## **2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

- 1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran memuat :
  - a) Unsur-unsur pendapatan
  - b) Unsur-unsur belanja
  - c) Unsur-unsur transfer
  - d) Unsur-unsur surplus/defisit

- e) Unsur-unsur pembiayaan
- f) Unsur-unsur sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Cimahi menganut Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*).

Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2011 adalah per 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011

- 2) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah:
- a) Basis Kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan
  - b) Basis AkruaI digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- 3) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomi adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan yang belum dieksplorasi.
- 4) Kas
- a) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
  - b) Pencatatan kas menggunakan basis kas
  - c) Kas di Kas Daerah dan di Bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal neraca.
  - d) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil opname kas di masing-masing pemegang kas (Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran).
- 5) Piutang
- a) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi
  - b) Piutang adalah transaksi yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan
  - c) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar nilai nominal
  - d) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut

- e) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD)
- 6) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
- a) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
  - b) Perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar TGR dinilai sebesar nilai nominal
  - c) Perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar TGR diakui pada saat timbulnya hak atas bagian lancar dari Tuntutan Perbendaharaan dan TGR.
- 7) Persediaan
- a) Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - b) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
    - Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
    - Biaya standar atau biaya produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
  - c) Jenis-jenis persediaan :
    - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK;
    - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misalnya *box file*;
    - Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan , misalnya *spare part* bekas kendaraan bermotor yang masih bisa digunakan;
    - Persediaan untuk dijual, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kesehatan, bibit, benih ikan dan sebagainya.
- 8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Lembaga keuangan lainnya dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal dengan memperhatikan metode cost dan metode equity.
- 9) Aset Tetap
- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber

dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap menggunakan standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku untuk instansi pemerintah.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penggunaan aset tetap sampai dengan saat ini belum dihitung penyusutannya. Terhadap aset tetap yang kondisinya rusak berat diklasifikasikan sebagai aset lainnya.

#### 10) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan baru dicatat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. Apabila penilaian konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan SP2D yang diterbitkan tidak memungkinkan, maka nilai konstruksi dalam pengerjaan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada saat perolehan.

#### 11) Built, Operate, and Transfer (BOT)

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain tersebut membangun dan/atau sarana lain beserta fasilitas diatas tanah tersebut, serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendaayagunaannya kepada negara setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

#### 12) Dana Bergulir

Dana Bergulir meliputi Program Pengembangan Usaha Kecil. Program Dana Bergulir berupa bantuan pinjaman penyaluran modal kepada pengusaha kecil sesuai dengan program Pemerintah Kota Cimahi. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Bank Jabar Cabang Cimahi.

Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah disalurkan dari Pemerintah Kota Cimahi kepada Bank Jabar Cabang Cimahi.

Program Pengembangan Usaha Kecil berupa bantuan kepada Usaha Kecil dibawah Bagian Bina Ekonomi dalam bentuk bantuan dengan bunga lunak, periode pinjaman 2 tahun dan bertujuan untuk penguatan Perekonomian Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah Kota Cimahi.

#### 13) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban lancar yang harus dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban ini dibukukan sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

- a) Bagian Lancar (BL) Kewajiban Kepada Pemerintah Pusat
- b) Merupakan Bagian Kewajiban Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Kewajiban Jangka Pendek, karena telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- c) Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga
- d) Merupakan Kewajiban Jangka Pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- e) Kewajiban Bunga, Denda dan *Commitment Fee*
- f) Kewajiban Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada *Lender* melalui DP3 (Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman) – Departemen Keuangan, atas realisasi pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, serta waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam pinjaman.

Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemerintah Daerah tidak dapat melunasi angsuran pokok maupun bunganya tepat waktu dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati bersama.

*Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditariknya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

#### 14) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nominal. Nilai kewajiban dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari :

- a) Kewajiban Kepada Pemerintah  
Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi
- b) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang  
Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi

#### 15) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah hak residual atas aset Pemerintah Kota Cimahi setelah dikurangi semua kewajiban.

Ekuitas dana terdiri dari :

- a) Ekuitas Dana Lancar

- b) Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih jumlah nilai Aset Lancar dikurangi dengan jumlah Kewajiban Jangka Pendek.
- c) Ekuitas Dana Investasi
- d) Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya, dibandingkan dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.
- e) Ekuitas Dana Cadangan, merupakan kekayaan Pemerintah Kota Cimahi yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Laporan Arus Kas

- 1) Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 2) Arus masuk dan arus keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
  - a) Aktivitas operasi
  - b) Aktivitas investasi nonkeuangan
  - c) Aktivitas pembiayaan
  - d) Aktivitas non anggaran

### 3. ORGANISASI PEMERINTAH KOTA CIMAHI

a. Pola Organisasi

Pola organisasi Pemerintah Kota Cimahi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Cimahi dengan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

- 1) Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi yaitu DPRD Kota Cimahi yang dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- 2) Badan Eksekutif yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - a) Walikota;
  - b) Sekretariat Daerah;
  - c) Dinas Daerah;
  - d) Lembaga Teknis Daerah;
  - e) Rumah Sakit Umum Daerah;
  - f) Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g) Kecamatan;
  - h) Kelurahan;



b. Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1) Asisten Pemerintahan terdiri dari :

- a) Bagian Pemerintahan, terdiri dari 3 Sub Bagian
- b) Bagian Hukum , terdiri dari 3 Sub Bagian
- c) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari 2 Sub Bagian

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- a) Bagian Administrasi Perekonomiani, terdiri dari 2 Sub Bagian
- b) Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari 2 Sub Bagian
- c) Bagian Kesejahteraan, terdiri dari 3 Sub Bagian

3) Asisten Administrasi Umum

- a) Bagian Keuangan, terdiri dari 3 Sub Bagian
- b) Bagian Pengelolaan Aset, terdiri dari 3 Sub Bagian
- c) Bagian Umum , terdiri dari 3 Sub Bagian
- d) Bagian Organisasi, terdiri dari 2 Sub Bagian

4) Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

##### a. Penjelasan Pos-pos Neraca

1)	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		66.301.281.492,61	96.024.002.012,61

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar 66.301.281.492,61 merupakan saldo Kas Pemerintah Kota Cimahi yang dikelola oleh Bendahara Umum Kas Daerah per 31 Desember 2011. Saldo berdasarkan rekening koran Kas Daerah Rekening No.0230270000025 sebesar Rp.66.275.077.190,00, didalamnya termasuk utang pfk tahun 2009 sebesar Rp 11.795.639,00. Selisih sebesar Rp26.204.303,00 tersebut merupakan kas pihak ke-3 karena kelebihan pembayaran pajak tunjangan tambahan penghasilan ke kas negara.

2)	Kas di RSUD	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		4.455.050.467,00	4.139.466.434,00

Saldo Kas di RSUD sebesar Rp4.455.050.467,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran RSUD, yang berasal dari pendapatan operasional rumah sakit. Tahun Anggaran 2009 Saldo Kas di RSUD masih digabungkan dengan Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD lain.

3)	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>31 Desember 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
		<b>516.026.404,00</b>	<b>134.877.719,00</b>

Saldo tersebut merupakan saldo kas yang ada di para Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31-12-2011 belum disetorkan ke rekening Kas Daerah dan Kas Negara. *Rincian saldo per SKPD selengkapnya disajikan pada lampiran 1*

4)	<b>Piutang Pajak</b>	<b>31 Desember 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
		<b>2.203.417.125,97</b>	<b>2.749.378.660,31</b>

Piutang Pajak sebesar Rp 2.203.417.125,97 adalah kewajiban pihak ketiga atas penetapan pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2011 belum dibayar dengan rincian sebagai berikut:

<b>U R A I A N</b>	<b>NILAI</b>	
- Pajak Daerah	Rp	246.523.470
- Bagi Hasil	Rp	1.956.893.655,97
	<b>Rp</b>	<b>2.203.417.125,97</b>

*Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 2*

5)	<b>Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan</b>	<b>31 Desember 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
		<b>32.570.875,00</b>	<b>34.370.875,00</b>

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Perbendaharaan sebesar Rp32.570.875,00 merupakan saldo Tuntutan Perbendaharaan atas kasus kelalaian bendahara dalam pengelolaan keuangan rutin yang jatuh tempo pada tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian keuangan daerah (1 kasus)	Rp	41.570.875,00
- Penerimaan pembayaran	Rp	(9.000.000,00)
Saldo Tunt. Perbendaharaan	Rp	32.570.875,00
Saldo Tuntutan Perbendaharaan terdiri dari:		
- Sisa bagian lancar	Rp	32.570.875,00
- Saldo bagian jangka panjang	Rp	0,00
Jumlah	Rp	<b>32.570.875,00</b>

6)	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>31 Desember 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
		<b>511.802.000,00</b>	<b>510.447.075,00</b>

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp511.802.000,00 merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang telah jatuh tempo tahun 2011 atas kasus kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian keuangan daerah ( 4 kasus )	Rp	409.477.500,00
Kerugian kehilangan aset daerah (11 kasus )	Rp	267.607.500,00
Jumlah	Rp	677.085.000,00
Penerimaan pembayaran	Rp	(165.283.000,00)
Saldo Tuntutan Ganti Rugi	Rp	511.802.000,00

Dari saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2011 sebesar 511.802.000,00, semuanya merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Pada Tahun Anggaran 2011 Walikota memberikan keringan tapi belum disertai SK Penghapusan Tuntutan Ganti rugi atas keringanan tersebut.

***Rincian Bagian Lancar TP / TGR ada di Lampiran 8.***

7)	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>31 Desember 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
		<b>2.241.942.166,00</b>	<b>3.665.300.091,00</b>

Piutang Lainnya sebesar Rp 2.241.942.166,00 merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan di RSUD Cibabat, dan Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar Antri Baru. Rincian piutang lainnya sebagai berikut :

<i>Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat</i>	Rp	2.017.804.641,00
<i>Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru</i>	Rp	224.137.525,00
<i>Jumlah</i>	Rp	2.241.942.166,00

***Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 3***

8)	<b>Persediaan</b>	<b>31 Desember 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
		<b>7.927.173.111,74</b>	<b>4.951.317.442,78</b>

Persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp7.927.173.111,74 adalah persediaan hasil inventarisasi yang dikelola oleh Bendahara Material pada dinas / badan / lembaga / instansi lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Persediaan Habis Pakai	Rp	604.036.098,83
- Persediaan Tak Habis Pakai	Rp	104.993.950,00
- Persediaan untuk dijual/diserahkan	Rp	7.218.143.062,91
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>7.927.173.111,74</b>

9)	Biaya Dibayar Dimuka	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		1.209.169.753,28	753.150.375,66

Saldo Biaya dibayar dimuka per 31-12-2011 sebesar Rp1.209.169.753,28 merupakan biaya dibayar dimuka atas sewa gedung, asuransi kesehatan dan asuransi kendaraan dinas. Biaya Dibayar Dimuka timbul karena pembayaran atas sewa/asuransi tersebut telah dilakukan pada tahun 2011, namun ada sisa periode/ manfaat pada tahun 2012.

*Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 5*

10)	Dana Bergulir	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		1.094.000.000,00	1.162.855.646,00

Dana Bergulir per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.094.000.000,00 adalah dana yang akan disalurkan kepada kelompok pengusaha golongan ekonomi lemah yang dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian.

Maksud dan tujuan penyediaan Dana Bergulir yaitu dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Cimahi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi mulai Rp2.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 per kelompok.

Dana Bergulir ini telah diberikan kepada 13 (tiga belas) kelompok usaha senilai Rp156.500.000,00. Disamping itu juga terdapat dana bergulir yang diberikan kepada usaha mikro sebanyak 153 nasabah senilai Rp387.500.000,00 dengan jangka waktu pinjaman untuk modal kerja tersebut maksimal adalah 2 (dua) tahun dan juga kepada 12 BMT dan Koperasi senilai Rp550.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman maksimal adalah 3 tahun.

11)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		76.625.475.045,52	68.778.945.800,98

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar 76.625.475.045,52 meliputi penanaman modal Pemerintah Kota Cimahi kepada Bank Jabar sampai dengan 31 Desember 2011 nilainya sebesar Rp26.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	Tahun 2002	A 51252724 s.d 51352723	1.000.000.000,00
2	Tahun 2003	A 68078382 s.d 68578381	5.000.000.000,00
3	Tahun 2004	A 86088523 s.d 86588522	5.000.000.000,00
4	Tahun 2005	A 107452762 s.d A 107952761	5.000.000.000,00
5.	Tahun 2006	A 126661855 s.d A 126911854	2.500.000.000,00
6.	Tahun 2007	A 149273979 s.d A 14952378	2.500.000.000,00
7.	Tahun 2008	-	2.500.000.000,00
8.	Tahun 2009	-	2.500.000.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>26.000.000.000,00</b>

Pada 31 Desember 2011 Bank Jabar Cimahi menerbitkan Surat Kolektif Saham Seri A nomor : 5981402104 s.d. 6075402103 untuk seluruh nominal Rp23.500.000.000,00. Penyertaan Modal Bank Jabar dicatat dengan menggunakan metode cost karena kepemilikan kurang dari 20%.

Sedangkan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi kepada Perusahaan Daerah (PD) Jati Mandiri sampai dengan per 31 Desember 2011 sebesar Rp50.625.475.045,52 yang dicatat dengan metode equity karena kepemilikan lebih dari 20%.

Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor: 10 Tahun 2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Pembentukan PD. Jati Mandiri, disebutkan bahwa jenis usaha meliputi bidang perdagangan, informatika dan telematika, air bersih, perumahan, dan jenis usaha lainnya.

12)	Aset Tetap	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		<b>1.323.112.712.028,07</b>	<b>1.261.731.544.528,34</b>

Jumlah tersebut merupakan hasil inventarisasi aset Pemerintah Kota Cimahi sampai dengan 31 Desember 2011 yang terdiri dari :

- Tanah	Rp	522.706.927.547,00
- Peralatan dan Mesin	Rp	176.086.340.012,07
- Gedung dan Bangunan	Rp	328.258.567.184,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	269.376.263.529,00
- Aset Tetap Lainnya	Rp	15.744.200.456,00
- Konstruksi Dlm Pengerjaan	Rp	10.940.413.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.323.112.712.028,07</b>

Nilai tanah sebesar 522.706.927.547,00 adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi yang terdiri dari tanah kosong, tanah atas bangunan, tanah di bawah konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah darat sekitar daerah irigasi.

Nilai tanah per 31 Desember 2004 telah ditetapkan berdasarkan estimasi harga perolehan yang dibuat oleh konsultan appraisal PT Winarasabena kecuali tanah di bawah konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah darat sekitar daerah irigasi yang ditetapkan berdasarkan estimasi harga perolehan yang dibuat oleh Dinas Tata Kota Cimahi. Sedangkan penambahan nilai tanah selama tahun 2011 berdasarkan nilai perolehan.

Saldo Peralatan dan Mesin senilai Rp. 176.086.340.012,07 terdiri dari tiga kelompok, yaitu Alat Besar, Alat Angkutan dan Alat Lainnya.

Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2004 dinilai dengan harga perolehan dan untuk yang tidak diketahui harga perolehannya digunakan estimasi harga perolehan dengan menggunakan indeks yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan tahun tertua tahun 1978. Sedangkan penambahan nilai peralatan dan mesin selama tahun 2011 berdasarkan nilai perolehan.

Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 328.258.567.184,00 adalah gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Cimahi berupa bangunan kantor, sekolah, dan bangunan lainnya yang terdapat pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Nilai Gedung per 31 Desember 2004 ditetapkan berdasarkan estimasi harga perolehan yang dibuat oleh konsultan appraisal PT Winarasabena. Sedangkan penambahan nilai gedung dan bangunan selama tahun 2011 berdasarkan nilai perolehan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 269.376.263.529,00 adalah nilai dari konstruksi jalan, jembatan, gorong-gorong, trotoar, bangunan air dan saluran. Yang dimaksud dengan jalan adalah jalan yang berstatus jalan kota.

Nilai konstruksi jalan, jembatan, gorong-gorong, trotoar, bangunan air dan saluran per 31 Desember 2004 ditetapkan berdasarkan estimasi harga perolehan yang dibuat oleh Dinas Tata Kota Cimahi. Sedangkan penambahan nilai selama tahun 2011 berdasarkan nilai perolehan.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 15.744.200.456,00 adalah aset lainnya milik Pemerintah Kota Cimahi antara lain berupa buku-buku perpustakaan.

Didalam Aset Tetap tersebut tidak termasuk didalamnya Aset Tetap yang rusak berat dengan nilai Rp3.615.756.331,00 dan juga pengadaan tahun 2011 yang nilainya dibawah Rp300.000,00.

Dalam saldo Aset Tetap tersebut termasuk Aset Tetap rusak berat pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan RSUD Cibabat seluruhnya sebesar Rp. 2.981.289.761,80 yang reklasifikasinya belum dapat dilakukan karena menunggu hasil inventarisasi lebih lanjut.

*Rincian Aset Tetap selengkapnya disajikan pada Lampiran 6.*

13)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		10.940.413.300,00	17.416.749.300,00

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp.10.940.413.300,00 ada pada *Lampiran 7*.

14)	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		0,00	47.741.925,00

Tidak ada saldo yang merupakan Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

*Rincian lihat lampiran 8.*

15	Aset Rusak Berat	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		3.615.756.331,01	309.512.500,00

Saldo Aset Rusak Berat merupakan asset rusak berat sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp3.615.756.331,01 dan Software SIMBADA dan LAN Sanditel yang tidak dapat digunakan lagi karena masih mengacu pada Kepmen no. 152 Tahun 2005 tentang Juknis Pengelolaan Barang Daerah. Nilai masing-masing Rp202.730.000 dan Rp106.782.500.

16)	Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		82.817.000,00	82.817.000,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp39.567.000,00 merupakan software aplikasi kenaikan gaji berkala dan Rp43.250.000,00 merupakan software sistem otomatisasi absensi pada Kantor Kepegawaian Daerah.

17)	Built, Operate, and Transfer – BOT	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		3.348.345.000,00	3.348.345.000,00

Nilai BOT sebesar Rp 3.348.345.000,00 adalah nilai estimasi harga perolehan atas tanah seluas +/- 8.575 m<sup>2</sup> yang diinvestasikan dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah untuk pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Antri yang berlokasi di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Nomor Perjanjian :

180 / 07 Perj-/2003 tanggal 17 Juli 2003.

008/Perj/BKI/VII/03

18)	Utang PFK	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		14.045.843,00	3.390.877.701,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp 14.045.843,00 merupakan selisih antara jumlah pemungutan oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD dikurangi jumlah yang disetor ke rekening Kas Negara atas PPh pasal 21, 22, 23 dan PPN. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut terdapat di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah.

*Jumlah saldo utang PFK tiap SKPD per 31 Desember 2011 tercantum pada Lampiran 1.*

19)	Bagian Lancar Utang Pengelolaan Sampah	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		55.661.042,38	78.700.448,16

Utang Pengelolaan Persampahan merupakan kewajiban yang jatuh tempo dan harus dibayar pada tanggal 15 Januari 2012 sebesar Rp 27.830.521,19 dan tanggal 15 Juli 2012 sebesar Rp27.830.521,19.

20)	Utang Bunga	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		358.488.916,01	0

Utang bunga merupakan kewajiban bunga yang jatuh tempo dan harus dibayar pada Tahun 2012 dengan rincian:

Utang Bunga - Utang Persampahan sebesar Rp. 8.956.774,31 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2012.

Utang Bunga - Utang Pemerintah Pusat sebesar Rp. 358.488.916,01 yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2012.

Utang bunga tersebut pada tahun 2010 masih digabung penyajiannya dengan pokok utangnya.

20)	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		855.508.219,86	855.508.219,86

Utang kepada Pemerintah Pusat merupakan utang sesuai dengan naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi dengan nomor : SLA-1208/DP3/2011 tanggal 18 April 2011. Saldo utang sebesar Rp855.508.219,86 tersebut merupakan bagian lancar utang kepada pemerintah pusat yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp427.754.109,93 dan tanggal 20 September 2012 sebesar Rp427.754.109,93.



21)	Utang Lain-lain	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		6.917.460.987,00	9.089.902.082,00

Utang Lain-Lain per 31 Desember 2011 sebesar Rp6.917.460.987,00 merupakan saldo utang kepada pihak ketiga atas biaya pemeliharaan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2011, utang RSUD Cibabat kepada rekanan serta utang kepada RS atas pelayanan Jamkesda.

*Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 9.*

22)	Utang Kepada Pemerintah Pusat	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		11.121.606.858,14	12.832.623.298,00

Utang kepada Pemerintah Pusat merupakan utang sesuai dengan naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi dengan nomor : SLA-1208/DP3/2011 tanggal 18 April 2009 sebesar Rp12.832.623.298,00. Sesuai dengan naskah perjanjian, pembayaran angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2011 dan terakhir tanggal 20 September 2025. Angsuran pertama dan kedua telah dilakukan pembayaran pada tanggal 20 Maret 2011 dan 20 September 2011 dengan nilai angsuran tetap masing – masing sebesar Rp427.754.109,93.

*Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 13.*

22)	Utang Prasarana Persampahan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		0	73.953.164,02

Merupakan kewajiban jangka panjang berdasarkan kontrak antara Kabupaten dengan Kota Bandung Nomor 236 Tahun 2003 tanggal 22-4-1993

5 Tahun 1993

Perihal Kerjasama Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Kotif Cimahi sebesar Rp1.113.220.847,00. Setelah menjadi Pemerintah Kota Cimahi, utang tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Kota Cimahi. Jumlah Utang Jangka Panjang yang harus dibayar s.d. Tahun 2012 sebesar Rp73.953.164,02 (Bagian Lancar).

23)	Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2011	31 Desember 2010
		77.570.645.033,36	100.399.763.287,70

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2011 adalah selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek, dengan rincian sebagai berikut:

-	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA)	Rp	71.258.312.520,61
-	Pendapatan Yang Ditangguhkan	Rp	0,00
-	Cadangan Piutang	Rp	4.989.732.166,97
-	Cadangan Persediaan	Rp	7.927.173.111,74
-	Cadangan Biaya Dibayar Dimuka	Rp	1.209.169.753,28
-	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Rp	(7.813.742.519,24)
	<b>JUMLAH</b>	Rp	<b>77.570.645.033,36</b>

24)	Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2011	31 Desember 2010
			<b>1.396.384.121.900,45</b>

Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2011 adalah selisih antara jumlah nilai Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang, dengan rincian sebagai berikut:

-	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp	77.719.475.045,52
-	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp	1.323.112.712.028,07
-	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp	7.046.918.331,01
-	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	Rp	(11.494.983.504,15)
	<b>JUMLAH</b>	Rp	<b>1.396.384.121.900,45</b>

## b. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

### 1) Realisasi Pendapatan Keseluruhan

Realisasi pendapatan secara total periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp721.746.717.931,61 atau mencapai 100,79 % dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2011 sebesar Rp 716.050.128.278,12. Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Transfer dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dibandingkan anggarannya, walaupun realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dibandingkan anggarannya.

#### a) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp116.677.729.307,61 atau mencapai 106,98 % dari target anggaran sebesar Rp 109.060.351.699,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari :

- Pajak Daerah sebesar Rp 42.613.533.717,00 atau 111,15 % dari anggaran sebesar Rp 38.340.000.000,00.

- Retribusi Daerah sebesar Rp8.381.624.811,00 atau 105,54 % dari anggaran sebesar Rp7.941.312.100,00.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 6.206.035.964,00 atau 75,63 % dari target sebesarRp 8.206.035.964,00.
- Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp59.476.534.815,00atau 108,99 % darianggaran sebesar Rp 54.573.003.635,00. Dalam realisasi Lain-lain PAD yang Sah terdapat Pendapatan dari BLUDRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat sebesar Rp 53.842.038.902,00 yang mekanisme penerimaannya tanpa melalui rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi tetapi melalui rekening Pemegang Kas di RSUD Cibabat.

**b) Realisasi Pendapatan Transfer**

- Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesarRp 466.133.402.882,00atau 101,37 % apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp 459.826.437.456,12,00.
- Pendapatan Transfer terdiri dari :
- Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat) sebesar Rp 42.345.322.275,00 atau 104,63 % dari anggaran sebesar Rp 40.471.764.987,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp 23.105.944.681,00atau 126,14% dari anggaran sebesar Rp 18.317.510.395,00
- Dana Alokasi Umum sebesar Rp 354.745.460.000,00 atau 100,00 % dari anggaran Rp 354.745.460.000,00
- Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1.967.400.000,00 atau 99,97 % dari anggaran sebesar Rp 1.968.000.000,00
- Dana Penyesuaian sebesar Rp 00,00 atau 00,00 % dari anggaran Rp00,00
- Dana Bagi Hasil Pajak (Provinsi) sebesar Rp 43.969.275.926,00 atau 99,20 % dari anggaran sebesar Rp 44.323.702.074,12,00.

**c) Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah**

- Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 138.935.585.742,00 atau tercapai 94,40 % dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp 147.180.149.123,00.
- Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :
- Dana Alokasi Cukai sebesar Rp1.332.113.722,00 atau 119,39 % dari anggaran sebesar Rp 1.115.775.303,00.
- Bantuan dari Provinsi sebesar Rp 46.607.400.500,00 atau 89,05 % dari anggaran sebesar Rp 52.338.320.000,00.

## 2) Realisasi Belanja

Realisasi Belanja periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp738.303.631.328,00 atau mencapai 92,09 % dari anggaran belanja tahun 2011 sebesar Rp 801.719.153.530,73

Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos belanja adalah sebagai berikut :

### a) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp633.961.071.386,00 atau mencapai 94,62 % dari anggaran belanja tahun 2011 sebesar Rp 670.001.352.881,00.

Realisasi Belanja Operasi terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp423.060.983.561,00 atau mencapai 95,22 % dari anggaran sebesar Rp 444.313.663.736,00.
- Belanja Barang sebesar Rp 174.339.522.181,00 atau mencapai 94,69 % dari anggaran sebesar Rp 184.119.506.945,00.
- Belanja Bunga sebesar Rp 1.316.448.454,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp 1.316.448.500,00.
- Belanja Hibah sebesar Rp 27.881.233.534,00 atau mencapai 91,81 % dari anggaran sebesar Rp 30.369.900.000,00.
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 7.361.083.656,00 atau mencapai 74,49 % dari anggaran sebesar Rp 9.881.833.700,00.

### b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 102.870.918.842,00 atau mencapai 81,38 % dari anggaran belanja tahun 2011 sebesar Rp 126.407.116.492,00.

Realisasi Belanja Modal terdiri dari :

- Belanja Tanah sebesar Rp 2.500.000.000,00 atau mencapai 68,49 % dari anggaran sebesar Rp 3.650.000.000,00.
- Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 36.900.829.652,00 atau mencapai 83,85 % dari anggaran sebesar Rp 44.006.829.652,00.
- Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp 23.560.886.634,00 atau mencapai 69,99 % dari anggaran sebesar Rp 33.661.153.397,00.
- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 32.717.513.402,00 atau mencapai 93,75 % dari anggaran sebesar Rp 34.899.815.443,00.
- Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 7.191.689.133,00 atau mencapai 70,58 % dari anggaran sebesar Rp 10.189.318.000,00.

**c) Belanja Tak Terduga**

Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.473.441.100,00 atau mencapai 27.74% dari anggaran sebesar Rp 5.310.684.157,00.

**3) Realisasi Pembiayaan**

Rekening Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

**a) Realisasi Penerimaan Daerah**

Realisasi Penerimaan Daerah dari Pembiayaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 96.895.646.067,61 atau 100,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 96.895.646.067,61. Jumlah sebesar Rp 96.895.646.067,61 tersebut merupakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp118.842.785.811,00.

**b) Realisasi Pengeluaran Daerah**

Realisasi Pengeluaran Daerah yang bersumber dari Pembiayaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 9.080.420.150,00 atau 80,76 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 11.243.430.816,00. Jumlah sebesar Rp 9.080.420.150,00 merupakan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari :

- Penyertaan Modal	Rp4.000.000.000,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman	Rp 5.080.420.150,00
- Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 0,00
Jumlah	<u>Rp 9.080.420.150,00</u>

**Realisasi Pendapatan :**

a. P A D	Rp 116.677.729.307,61
b. Pendapatan Transfer	Rp 466.133.402.882,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 138.935.585.742,00
Jumlah a + b + c	<u>Rp 721.746.717.931,61</u>

**Realisasi Belanja:**

a. Belanja Operasi	Rp 633.959.271.386,00
--------------------	-----------------------

b. Belanja Modal	Rp	102.870.918.842,00	
c. Belanja Tak Terduga	Rp	1.473.441.100,00	
Jumlah a + b + c			Rp 738.305.431.328,00
Surplus / ( Defisit ) (I)			Rp ( 16.556.913.396,39)
<b>Realisasi Pembiayaan :</b>			
a. Penerimaan	Rp	96.895.646.067,61	
b. Pengeluaran	Rp	9.080.420.150,00	
Pembiayaan Netto (II)			Rp 87.815.225.917,61
SiLPA tahun 2011 (I) + (II)			Rp 71.258.312.521,22

#### 4) Perhitungan SILPA

### C. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kota Cimahi tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp 28.966.661.546,00. Jumlah ini diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 86.314.005.445,00, selisih kurang dari aktivitas investasi aset nonkeuangan sebesar Rp 102.870.918.842,00, ditambah selisih kurang dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp 9.080.420.150,00 dan selisih kurang dari aktivitas nonanggaran sebesar Rp 3.329.327.999,00. Apabila penurunan arus kas tahun 2011 ditambah dengan saldo Kas per 31 Desember 2010 sebesar Rp 100.236.769.705,00 maka Saldo Kas per 31 Desember 2011 berjumlah Rp 71.270.108.159,61.

Saldo Kas sebesar Rp 71.270.108.159,61. terdiri dari SiLPA sebesar Rp 71.258.312.520,61 dan saldo utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) sebesar Rp 11.795.639,00. Saldo PFK merupakan Utang PFK di Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Kas Negara.

SiLPA sebesar Rp 71.258.312.520,61 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp 66.263.281.550,61 dan saldo Kas di para Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 513.776.200,00 serta Kas di RSUD sebesar Rp 4.455.050.467,00, dan kas di pihak ke-3. Dalam laporan arus kas ini tidak menyajikan saldo PFK di SKPD dan saldo jasa giro.

Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas adalah sebagai berikut :

#### 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 86.312.205.445,61,00 terdiri dari:

Arus Masuk Kas	Rp	721.746.717.931,61
Arus Keluar Kas	Rp	(635.432.712.486,00)
Arus Kas Bersih	Rp	86.314.005.445,61

- a) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp721.746.717.931,61 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 116.677.729.307,61 terdiri dari :

Pajak Daerah	Rp	42.613.533.717,00
Retribusi Daerah	Rp	8.381.624.811,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	6.206.035.964,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	59.476.534.815,61
Jumlah	Rp	<u>116.677.729.307,61</u>

Dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat Pendapatan dari BLUD RSUD Cibabat sebesar Rp 53.842.038.902,00 yang mekanisme penerimaannya tanpa melalui rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi tetapi melalui rekening Pemegang Kas di RSUD Cibabat dengan nomor rekening 023.000.30.609.00

(b)Pendapatan Transfer sebesar Rp 466.133.402.882,00 terdiri dari :

Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	42.345.322.275,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	23.105.944.681,00
Dana Alokasi Umum	Rp	354.745.460.000,00
Dana Alokasi Khusus	Rp	1.967.400.000,00
Dana Penyesuaian	Rp	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	43.969.275.926,00
Jumlah	Rp	<u>466.133.402.882,00</u>

(c)Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat) sebesar Rp 42.345.322.275,00 terdiri dari :

Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	28.856.905.383,00
BPHTB	Rp	0,00
PPh Pasal 21, 25 dan 29	Rp	13.488.416.892,00
Jumlah	Rp	<u>42.345.322.275,00</u>

(d)Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi) sebesar Rp43.969.275.926,00terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	14.776.518.108,00
Bea Balik Nama Kend Bermotor	Rp	20.312.684.171,00

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	9.029.711.256,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Rp	93.775.264,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp	77.588.518,00
Bagi Hasil Retribusi Metrologi	Rp	33.424.756
Jumlah	Rp	<u>43.969.275.926,00</u>

(e)Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 138.935.585.742,00 terdiri dari :

Dana Alokasi Cukai	Rp	1.332.113.722,00
Dana Penyesuaian (BOS)	Rp	90.996.071.520,00
Bantuan dari Provinsi	Rp	46.607.400.500,00
Jumlah	Rp	<u>138.935.585.742,00</u>

**b)** Arus Keluar Kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp 635.432.712.486,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Rp	423.060.983.561,00
Belanja Barang	Rp	174.339.522.181,00
Bunga	Rp	1.316.448.454,00
Hibah	Rp	27.881.233.534,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	7.361.083.656,00
Belanja Tak Terduga	Rp	1.473.441.100,00
Jumlah		<u>635.432.712.486,00</u>

Belanja Hibah sebesar Rp 27.881.233.534,00 direalisasikan untuk :

- Kelompok Masyarakat/Perorangan	Rp	4.265.950.000,00
- Badan/Lembaga/Org. Swasta	Rp	23.615.283.534,00
Jumlah	Rp	<u>27.881.233.534,00</u>



Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 7.361.083.656,00 direalisasikan untuk :

- Partai Politik	Rp	781.833.656,00
- Kemasyarakatan	Rp	6.561.342.375,00
Jumlah	Rp	<u>7.343.176.031,00</u>

Belanja Tak Terduga sebesar Rp 1.473.441.100,00 dari anggaran sebesar Rp 5.310.684.157,73.

## 2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar Rp(102.870.918.842,00) terdiri dari :

• Arus Masuk Kas	Rp	0,00
• Arus Keluar Kas	Rp	(102.870.918.842,00)
• Arus Kas Bersih	Rp	<u>(102.870.918.842,00)</u>

a) Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah nihil

b) Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan sebesar Rp 102.870.918.842,00 merupakan belanja modal berupa pembelian/ pengadaan dari:

- Tanah	Rp	2.500.000.000,00
- Peralatan dan Mesin	Rp	36.900.829.673,00
- Gedung dan Bangunan	Rp	23.560.886.634,00
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	32.717.513.402,00
- Aset Tetap Lainnya	Rp	7.191.689.133,00
Jumlah	Rp	<u>102.870.918.842,00</u>

### 3) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp( 9.080.420.150,00) terdiri dari :

• Arus Masuk Kas	Rp	0,00
• Arus Keluar Kas	Rp	(9.080.420.150,00)
• Arus Kas Bersih	Rp	(9.080.420.150,00)

a) Arus Masuk Kas dari aktivitas pembiayaan adalah nihil.

b) Arus Keluar Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp 9.080.420.150,00 adalah belanja :

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	4.000.000.000,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman	Rp	5.080.420.150,00
Jumlah	Rp	9.080.420.150,00

### 4) Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran

Arus kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran sebesar (Rp3.329.327.999,00) yang terdiri dari :

• Arus Masuk Kas	Rp	35.629.495.367,00
• Arus Keluar Kas	Rp	(38.958.823.366,00)
• Arus Kas Bersih	Rp	(3.329.327.999,00)

a) Arus Masuk Kas merupakan penerimaan perhitungan fihak ketiga berupa :

- PPh Pasal 21	Rp	15.313.102.939,00
- PPh Pasal 22	Rp	0,00
- PPh Pasal 23	Rp	0,00
- PPN	Rp	0,00
- PPh Pasal 4 ayat(2)	Rp	0,00
- Lainnya	Rp	20.316.392.425,00
Jumlah	Rp	35.629.495.364,00

b) Arus Keluar Kas merupakan pengeluaran perhitungan fihak ketiga berupa :

- PPh Pasal 21	Rp	15.313.102.939,00
- PPh Pasal 22	Rp	0,00
- PPh Pasal 23	Rp	0,00
- PPN	Rp	0,00
- PPh Pasal 4 ayat(2)	Rp	0,00
- Lainnya	Rp	20.316.392.425,00
- Setoran PFK TA 2010	Rp	3.329.327.999,00
Jumlah	Rp	<u>38.958.823.366,00</u>